

**GABUNGAN SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1962-1964**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Sejarah dan dan Kebudayaan Islam

Oleh :

ARI YUDIAWATI
NIM : AO.2.3.95.035

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
2000**

Ria Computer

PO

PENGETIKAN - PENJILIDAN - PERCETAKAN
Jl. Jemurwonosari Lebar 38 Wonocolo - Surabaya
☎ (031) 8497316 - 8497656

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh saudari Ari Yudiawati ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya. Juni 2000
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Drs. M. Hudan Asmara
NIP. 150 042 022

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

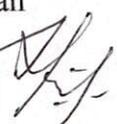
Skripsi oleh **Ari Yudiawati** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 10 Agustus 2000

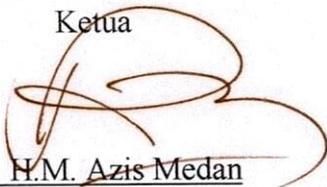
Mengesahkan,
Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan


Dr. H. Ali Mufrodi, MA.
NIP. 150 203 741

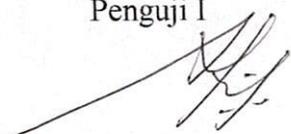
Ketua


Drs. H.M. Azis Medan
NIP. 150 221 316

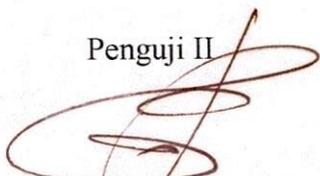
Sekretaris

Drs. Amiq, MA.
NIP. 150 261 709

Penguji I


Dr. H. Ali Mufrodi, MA.
NIP. 150 203 741

Penguji II


Drs. M. Ridwan Abu Bakar.
NIP. 150 231 822

GASBIINDO

هو ائتلاف النقابة العمالية الإسلامية الإندونيسيا التي يكافح
ويجاهد منه في العمالية والسياسة. إن حركة في العمالية
هي يعاند ويضد الرخيص المعاش وغير ترتيب النظام المعاشات
والصحة البدنية من العمال. ليحصل ذلك المراد ينشئه مؤسسة
والشركة وسيارة وعربة للسلامة والأمن من العمال.

وإن حركة منه في السياسة هو يعاند ويضد

الاستعمارية والأمبريالية. أما GASBIINDO قد نصر الحكومة الإندونيسيا
منذ الحكومة يرجع Irian Jaya في الولاية الإندونيسيا. والآخر أنه
من حركته هي يهلك الحكومة الصورية الملاسيا (Malaysia)
بالإنجليزي.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Alasan Memilih Judul.....	9
D. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penulisan.....	11
F. Metode Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : GABUNGAN SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA	
A. Demokrasi Terpimpin.....	14
B. Latar Belakang Lahirnya GASBIINDO.....	17
C. Perpecahan Dalam Tubuh SBII.....	26

	D. Lahirnya GASBIINDO.....	29
BAB	III : PERJUANGAN GASBIINDO PADA MASA DEMOKRASI	
	TERPIMPIN TAHUN 1961 – 1964	
	A. Situasi Politik Menjelang Tahun 1961.....	35
	B. Perjuangan GASBIINDO Pada Lapangan Perburuhan.....	39
	C. Perjuangan GASBIINDO Pada Lapangan Politik.....	49
BAB	IV : DAMPAK DAN HASIL YANG DICAPAI GASBIINDO	
	A. Dampak GASBIINDO.....	53
	B. Hasil Yang Dicapai.....	54
BAB	V : KESIMPULAN DAN PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Penutup.....	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

lembaga-lembaga negara yang sebelumnya hanya diwakili oleh partai politik yang sealian. Sedangkan kondisi politik yang merugikan yaitu diterapkannya sistem demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan alam Indonesia, sehingga mengakibatkan jatuh banggunya pemerintah, hal ini berdampak pada partai politik dan secara langsung berpengaruh pula pada organisasi buruh.

Dalam menulis masalah gerakan sarekat buruh tidak dapat dipisahkan dari keberadaan buruh dalam masyarakat. Diterapkannya sistem ekonomi kapitalis oleh pemerintah kolonial Belanda, melahirkan golongan masyarakat yang tidak mempunyai alat produksi, golongan inilah yang disebut kaum buruh. Sistem kapitalis ini mengalami suatu perkembangan yakni melahirkan cara dan alat-alat produksi yang lebih sempurna dalam bentuk pabrik yang melahirkan masa buruh². Masa kaum buruh ini walaupun tidak sebanyak seperti di negara yang industrinya sudah maju, tetapi cukup mewarnai gerakan sarekat buruh Indonesia.

Kelahiran organisasi sarekat buruh yang bernama Sarekat Buruh Islam (SBI) tahun 1947, disaat perjuangan bangsa Indonesia sedang dalam keadaan yang sangat menentukan. SBI dilahirkan sebagai manifestasi dari rasa kesadaran yang tinggi kaum buruh Islam khususnya, dan Masyumi serta umat Islam pada umumnya terhadap panggilan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.

². DN. Aidit, *Revolusi Indonesia, Latar Belakang Sejarah dan Hari Depan*, (Jakarta; Pembaharuan, 1964) 9.

Pada masa demokrasi liberal, keberadaan sarekat buruh Islam Indonesia tergantung pada program-program partai, berlakunya demokrasi parlementer membawa keberadaan tak menentu. Pertentangan terbuka antar golongan, antar individu semakin besar. Kabinet pada masa demokrasi parlementer umumnya tidak dapat bertahan lama. Rata-rata delapan bulan dan hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi politik karena pemerintah tidak dapat menjalankan program-programnya³.

Terpengaruh kondisi yang tidak menentu seperti itu Sarekat Buruh Indonesia (SBII) dalam muktamarnya di Jakarta tahun 1965 pecah menjadi dua yakni Sarekat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan satunya bernama Kesatuan Buruh Islam Merdeka (KBIM). Keadaan yang tidak menentu di Indonesia dengan jatuh bangunnya kabinet, akhirnya oleh Presiden Soekarno ditantang secara terbuka melalui pidato-pidatonya. Pada tahun 1956, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul *Bangsaku 'Gemes dan Geram'* tentang kepartaian⁴. Puncak masalah ini yaitu dengan diberlakukannya dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang besar arti dan pengaruhnya bagi kehidupan buruh di Indonesia dan sarekat buruh Indonesia khususnya.

Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No : 7 tahun 1959 tertanggal 31 Desember 1959 yang berisi tentang hak-hak

³ Miriam Budihrajo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia, 1982) 70.

⁴ H.A Notosutarjo, *Kembali Pada Jiwa Proklamasi*, (Jakarta; Endang 1964) 5

hidup partai politik. Penetapan Presiden tentang partai ini tampaknya mempunyai dampak terhadap bubarnya Masyumi dan partai sosialis Indonesia (PSI)⁵.

Sebagai tindak lanjut sesudah dikeluarkannya penetapan Presiden yang juga mengatur tentang organisasi masyarakat yang menjadi pendukung partai politik, Maka dalam Mukhtamar SBII keenam di Jogjakarta pada tanggal 26-1-1960 diputuskan bahwa SBII adalah organisasi buruh yang independen dan non partai serta mengubah bentuknya dari unitaris menjadi federasi. Keputusan direalisasikan dengan memecah sarekat buruh Islam Indonesia (SBII) menjadi enam sarekat buruh yaitu : Sarekat buruh perkebunan Indonesia (SERBUPI), Sarekat buruh minyak dan tambang (SERBUMIT), Sarekat buruh perusahaan gula (SBPG), Sarekat pekerja pegawai negeri dan daerah otonom (SERPENDO), Sarekat buruh perhubungan dan transportasi (SBPT), Sarekatburuh industri dan umum (SERBIUM)⁶.

Dalam penyempurnaan organisasinya yang telah berbentuk federasi, maka pada tahun 1961 diadakan sidang majlis nasional Gasbiindo pertama di Jakarta pada tanggal 5-7 November. Dalam sidang majlis ini disepakati untuk mengubah nama Gabungan sarekat buruh Islam Indonesia (Gasbiindo).

⁵. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta; LP3ES, 1985)188-189.

⁶. Solikhin Salam, *Gasbiindo Soko Guru Revolusi Indonesia*, (Jakarta; PB Gasbiindo, 1964) 164-165.

Sesuai dengan mukaddimah dalam anggaran dasar Gasbiindo telah disebutkan bahwa dasar perjuangannya adalah keislaman hal itu diungkapkan sebagai berikut :

"Meyakini kebenaran Islam sebagai ajaran. Hukum dan falsafah hidup dan untuk mengatur kehidupan serta penghidupan manusia didunia dan diakhirat. Menjunjung tinggi piagam Jakarta yang menjiwei UUD'45 dan Pancasila sebagai dasar negara menginsafi kedudukan kaum buruh sebagai golongan karya yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan Republik Indonesia meneruskan khithah perjuangan revolusioner islam"⁷.

Gasbiindo memandang ajaran Islam, cita-cita Islam dan rukun-rukun Islam sebagai dasar dan pedoman perjuangan hal ini mengenai terutama kehidupan perekonomian, cara berhubungan dengan sesama manusia dan berusaha mendapatkan falsafah hidup dan amal kebajikan terhadap sesama warga masyarakat.

Pada tahun 1961 Gasbiindo mulai menjalin hubungan baik dengan pemerintah, program-program khususnya dalam masalah politik disesuaikan dengan program-program pemerintah, kebersatuan itu dijalin dengan baik oleh Gasbiindo. Jalinan kerja sama antara Gasbiindo dengan pemerintah itu merupakan kepemimpinan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Keberhasilan Gasbiindo dalam menjalin hubungan baik dengan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin, didukung oleh politik

⁷: Lihat, Mukadimah Dalam Anggaran Dasar Gasbiindo.

penyesuaian diri⁸. Yang diterapkan oleh Gasbiindo. Politik penyesuaian diri Gasbiindo terhadap pemerintah ini tercermin dalam anggaran dasar Gasbiindo pada Bab 4 tahun 1963 yang berbunyi : "Gasbiindo dalam menjalankan daya dan upaya serta melaksanakan perjuangannya berpedoman pada manifesto politik Republik Indonesia".

Gerakan yang dilakukan Gasbiindo mencakup masalah perburuhan dan tidak meniggalkan masalah politik sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila dan UUD'45 sebagai dasar dan falsafah negara. Gasbiindo sebagai organisasi buruh sudah barang tentu dalam perjuangannya membela kaum buruh. Adapun yang dilakukan dengan jalan mengajukan tuntutan baik kepada pihak majikan atau pemerintahan dalam bentuk resolusi-resolusi. Konflik yang terus menerus terjadi antara kelompok komunis dan angkatan bersenjata. Dialami demokrasi terpimpin mengakibatkan memudarnya pengaruh pemimpin revolusi Indonesia⁹, dan begitu pula dengan Gasbiindo yang menjalin kerjasama dengan pemerintah semakin surut gerakannya di pentas nasional.

⁸ Istilah Politik Penyesuaian Diri digunakan oleh Delia Noer Untuk Menyebutkan Tingkah Laku dari 3 Partai dan Ormas yang Bernafaskan ke Islam yang mampu bertahan dalam Demokrasi Terpimpin. Dalam tulisan ini Istilah Politik Penyesuaian Diri digunakan untuk menyebutkan perilaku Gasbiindo yang dalam kebijaksanaannya selalau disesuaikan dengan pemerintah. Lihat Delia Noer, Partai Islam dipentas Nasional, (Jakarta; Grafity, 1987) 388.

⁹ Pemimpin Revolusi Indonesia adalah Istilah yang digunakan Herbert Feith untuk menyebutkan Presiden RI yaitu Soekarno, Lihat Herberth, Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta; LP3ES, 1988) 1.

B. Definisi Operasional.

Dalam menulis skripsi ini, akan diuraikan arti dan++ maksud judul untuk memudahkan pemahaman terhadap isi atau materi skripsi ini :

Sarekat Buruh Islam : Organisasi atau gabungan organisasi buruh yang dibentuk secara sukarela oleh buruh-buruh di Indonesia dengan tujuan terutama untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan buruh dalam hubungan kerja, yang didasari ajaran Islam¹⁰.

Demokrasi Terpimpin : Demokrasi yang dimaksud untuk menentang sifat-sifat liberal dari pada Demokrasi Barat, yang bertentangan dengan asas-asas permusyawaratan untuk mencapai mufakat, sesuai dengan Pancasila¹¹.

Maka dapat disimpulkan maksud judul Skripsi ini adalah : Mengemukakan berbagai segi yang menyangkut gabungan dari beberapa Sarekat Buruh Indonesia yang berwawasan Islam pada masa Demokrasi Terpimpin.

¹⁰. Prof. Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Penerbit Djambatan, 1995) 32.

¹¹. Ensiklopedi Umum, Yayasan Karnisius (Jakarta; 1973) 301

C. Alasan Memilih Judul

1. Gasbiindo merupakan "Penyelamat" Organisasi buruh dari kelompok Islam yang mengalami goncangan karena demokrasi terpimpin.
2. Gasbiindo sebagai organisasi buruh tidak hanya berjuang dalam bidang perburuhan tetapi juga pada masalah politik.

D. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah

Agar topik menjadi jelas, maka diberi scope temporal dan scope special. Pembahasan scope spesialnya dalam tulisan ini bersifat pada kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pengurus besar Gasbiindo.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan atau keputusan banyak keluar dari Jakarta sebagai tempat sekretariat pengurus besarnya, serta beberapa daerah sebagai akibat kebijaksanaan pengurus pusat tersebut. Persoalan ini disebabkan pengurus Gasbiindo ada di daerah, tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi baik ditingkat konsulat maupun ditingkat komisariat. Sehingga segala tindakannya didaerah-daerah sesuai dengan instruksi dari pusat.

Pembahasan scope temporal adalah tahun 1961-1964, tetapi agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang proses sejarah yang terjadi sebelumnya, serta yang melatarbelakangi suatu kejadian, maka perlu dibahas pula peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, terutama yang

mempunyai kausalitas dan pokok bahasan, pembahasan latar belakang ini juga dimaksudkan agar tercapai wujud cerita yang utuh dan menyeluruh serta tidak sepotong-potong.

Tahun 1961 merupakan tahun dilaksanakannya Majelis Nasional Gasbiindo yang pertama di Jakarta. Gasbiindo adalah nama yang diputuskan dalam sidang ini untuk mengganti nama Sarekat Buruh Islam Indonesia. Munculnya Gasbiindo mengawali babak baru dalam sarekat buruh Islam karena sudah tidak lagi berafiliasi kepada salah satu partai politik dan menempatkan gerakannya pada cita-cita Sarekat buruh Islam. Yakni memperjuangkan nasib anggotanya yang sesuai dengan tingkat penghidupan yang layak bagi kaum buruh dan untuk memperkuat front kaum buruh yang secara konsekwen setia kepada pemerintah dan setia membela Pancasila sebagai dasar negara. Tahun 1964 adalah saat dilaksanakannya sidang majelis nasional Gasbiindo ke-3 yang dilaksanakan di Jakarta sebagai sidang terakhir dilaksanakan oleh Gasbiindo pada masa demokrasi terpimpin.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Gasbiindo didirikan?
2. Apa dan bagaimana perjuangan yang dilakukan Gasbiindo pada masa demokrasi terpimpin?

3. Bagaimana hasil dan dampak Gasbiindo pada masa demokrasi terpimpin?

E. Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui perkembangan organisasi buruh Islam di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
2. Untuk mengetahui Perjuangan Gasbiindo.
3. Untuk mengetahui dampak dan hasil yang dicapai Gasbiindo.

F. Metode Penulisan.

1. Sumber data

Adapun sumber-sumber data yang dipakai yang ada kaitannya dengan skripsi ini adalah sumber kepustakaan yaitu mengambil data dari berbagai buku-buku, Surat kabar, serta dokumen atau arsip yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

2. Pengumpulan data

Dengan jalan studi kepustakaan diperoleh dan dikumpulkan data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

3. Pengolahan data

Untuk memperoleh data atau fakta yang sesuai dengan pembahasan ini, maka data diolah dengan melalui :

- a. Seleksi, yaitu memilih data yang dianggap relevan dengan penulisan skripsi ini.

- b. Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan antara beberapa data tentang suatu masalah, kemudian diambil suatu kesimpulan.

4. Penyajian tulisan

- a. Informatif Interpretatif : Penyajian tulisan yang diambil dari data yang telah diolah.
- b. Informatif Diskriptif : yaitu penyajian apa adanya tentang suatu masalah sebagaimana yang diambil dari sumber data.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis menganggap perlu adanya pembahasan secara singkat dan sistematika. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab, yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I : Berisi Pendahuluan. Dalam bab ini didalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, Alasan memilih judul, Ruang lingkup dan rumusan masalah, Tujuan penulisan, Metode penulisan, Sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang lahirnya Sarekat Buruh Islam Indonesia (SBII) sampai dengan mengganti nama dengan Gasbiindo dan apa sebenarnya yang menjadi pemikiran para tokoh SBII pada waktu itu untuk mengubah bentuk dari unitaria menjadi fedetrasi. Pembahasan ini juga memperjelas, dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dengan

diputuskannya Gasbiindo sebagai organisasi buruh yang independen danin partai.

BAB III : Berisi tentang seberapa jauh gerakan-gerakan yang dilakukan Gasbiindo dalam memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup anggotanya dan kaum buruh pada umumnya. Kemudian diuraikan gerakan yang dilakukan Gasbiindo pada bidang politik.

BAB IV : Berisi hasil dan dampak yang dilakukan Gasbiindo pada masa demokrasi terpimpin.

BAB V : Kesimpulan dan penutup

BAB II

Gabungan Sarekat Buruh Islam Indonesia

A. Demokrasi Terpimpin

Masa tahun 1957 sampai 1965 merupakan masa ketika peranan demokrasi Indonesia bukan saja menurun tetapi hampir saja berganti menjadi diktatur. Sekurang-kurangnya, terutama dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959, masa ini mencatat bangkit dan berkembangnya suatu pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa segan tiap oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Sistem ini disebut secara populer demokrasi terpimpin atau nama yang diberikan Presiden Soekarno sendiri, sistem yang menurut dia sesuai dengan keadaan dan keperluan tanah air. Masa ini ditandai oleh pelemparan pemikiran, gagasan, serta reaksi terhadap demokrasi terpimpin. Masa ini juga merupakan masa yang memungkinkan sistem itu tegak atas UUD Sementara 1950. pemerintah dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya yang konstitusional masih tetap Soekarno. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa Soekarno mulai aktif dalam pemerintahan itu. Artinya, Presiden tidak lagi bersikap sebagai kepala negara konstitusional. Kemudian, tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945

didekritkan, dan dengan demikian kepala negara pun resmi menjadi kepala pemerintahan.¹²

Pada tanggal 27 Januari 1957 dalam suatu rapat umum "Merah Putih" di Bandung, Presiden mengungkapkan keinginannya untuk mencampuri urusan pemerintah dalam masa-masa peralihan ini, yaitu sebelum konstituante selesai kerja sampai hasil konstituante dapat direalisasikan. Sesudah pidato ini gagasan Soekarno tambah jelas ia memanggil para pemimpin partai pemerintah ke Istana Bogor pada tanggal 16 Februari 1957 dan mengatakan perlu terbentuknya suatu Dewan Nasional yang akan bertugas memberi nasehat pada kabinet. Menurut Soekarno, dewan ini akan memberi nasehat pada kabinet, diminta atau tidak ia menambahkan bahwa dewan akan menjadi cermin dalam masyarakat, sedangkan kabinet cermin dari parlemen.

Natsir dan partainya, Masyumi menolak pandangan Presiden tentang sistem partai dan demokrasi pada umumnya serta konsepsi kepala negara itu.¹³

Gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin tidak jelas perinciannya pada mulanya. Gagasan berkembang terus, dan implementasinya juga senantiasa disesuaikan dengan keadaan atau keperluan tertentu dari Soekarno untuk mencapai tujuan sesaat. Keinginan Soekarno seperti yang telah dikatakan ialah akan sekurang-

¹² Abadi, 30 Oktober 1956 ; Duta Masyarakat 29 Oktober 1956 ; Merdeka 30 Oktober 1956

¹³ Duta Masyarakat 1 Nopember 1956 ; Merdeka 31 Oktober 1956

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kurangnya empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dapat bersama-sama duduk dalam kabinet. Dua orang tokoh PKI memang akhirnya menjadi menteri pada tahun 1962 tetapi ini berupa kedudukan *ex officio*, karena mereka menjadi wakil ketua MPRS. Aidit, Sekretaris Jendral PKI dan wakil ketua DPRGR. Lukman, Wakil Sekretaris Jendral PKI. Sebaliknya, Masyumi juga tidak serta malah semenjak tahun 1960 ia telah tiada. Hal ini, seperti juga larangan bagi PSI tidak diperkirakan sebelumnya tentang tidak sertanya PKI dalam kabinet, NU memang menuntut ini dengan tegas. Tetapi NU tidak pernah menyatakan ketidaksetujuannya dengan pembubaran Masyumi. Sungguh pun sebelumnya ketiga partai Islam itu begitu erat bekerjasama dalam konstituante. Dan seperti kita ingat bersama-sama mengeluarkan pernyataan untuk menolak **konsepsi Soekarno tanggal 2 Maret 1957.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pidato kenegaraan Soekarno tahun 1960 yang dikenal dengan manifesto politik menjadi garis-garis besar haluan negara yang diresmikan oleh MPRS tahun 1961. GBHN ini, menurut UUD 1945, menjadi tugas MPR, tetapi dengan kedudukan Soekarno yang begitu kuat para calon MPRS harus lebih dahulu menyatakan kesetiaannya pada manipol sebagai syarat pengangkatannya sebagai anggota. Oleh sebab itu, tidak ada kemungkinan baginya untuk mengubah manipol yang menjadi GBHN itu. Bersama DPRGR, MPRS lebih merupakan stempel bagi semua pemikiran, gagasan dan keinginan Soekarno.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Latar Belakang Lahirnya GASBIINDO

Industri yang diterapkan di Indonesia melahirkan segolongan manusia yang tidak memiliki alat produksi dan golongan lain yang memiliki alat produksi. Golongan manusia yang tidak memiliki alat produksi inilah yang disebut dengan kaum buruh, yaitu segolongan manusia yang dalam melangsungkan kehidupannya hanya dengan menjual tenaga.

Industri yang berkembang secara pesat dan secara besar-besaran, melahirkan kaum buruh yang besar pula. Kaum buruh ini sebagai salah satu golongan yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan¹⁴. Kaum buruh dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya harus bekerja dengan keras sehingga yang dilakukannya tidak hanya menerobos di dunia industri melainkan juga di bidang yang lain, termasuk semua bidang pelayanan baik pemerintahan maupun swasta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kaum buruh menyadari bahwa mereka sebagai unsur utama bagi kapitalisme dalam mewujudkan keuntungan-keuntungan dan menyadari bahwa dalam penentuan upah digunakan sistem yang tidak adil¹⁵, sehingga terjadi kepincangan di dalam imbalanced sosial. Kaum buruh yang sadar bahwa sistem yang diterapkan tidak menguntungkan bagi mereka, maka mereka bertekad untuk mengubah sistem yang tidak adil itu menjadi sistem yang berkeadilan sosial.

¹⁴ Joost kuitenbuwer, *Tata Baru Kapitalisme Sedunia*, (Jakarta ; Lembaga Studi Pembangunan, 1982) 7

¹⁵ Ketidakadilan sistem itu seperti nilai lebih atau laba bersih dari suatu usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam sistem kapitalis laba bersih atau nilai lebih itu menjadi hak penuh dari kaum pemilik modal dan kaum buruh tidak berhak mendapatkannya.

Kaum buruh mendapatkan pengalaman bahwa dalam memperjuangkan sesuatu tidak mungkin berhasil jika dilakukan dengan cara individu, tetapi harus dilakukan dengan cara bersama-sama, dengan ini maka timbulah organisasi buruh. Dalam perkembangannya organisasi buruh ini bersifat permanen, demokratis dan yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk melindungi anggotanya, antara lain : (1) memberikan perlindungan dalam bidang pekerjaan; (2) untuk memperjuangkan nasib dengan jalan memberikan perlindungan secara kolektif; (3) untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi anggota-anggotanya; (4) untuk menampung dan menyatakan pendapat anggotanya mengenai masalah-masalah yang dihadapi¹⁶.

Di zaman penjajahan sangat kecil perhatian yang ditujukan terhadap perbaikan nasib kaum buruh khususnya yang bermafaskan ke-Islaman. Modal asing dengan semena-mena dapat mengeksploitasi tenaga buruh, sedangkan pemerintah Hindia Belanda menggunakan kekuasaan politik untuk menindas gerakan buruh.

Kelahiran Sarekat Islam sebagai partai politik dalam tahun 1911 di bawah pimpinan HOS. Cokroaminoto ada beberapa tokohnya yang mengarahkan perhatiannya pada masalah perburuhan. Hal ini tampak seperti yang dilakukan oleh Sosrokardono dan Suryopranoto dalam membentuk organisasi vaksentral buruh yang bernama Persatuan

¹⁶ Agus Sudono, *Gerakan Buruh Indonesia dan Kebijaksanaannya*, (Jakarta ; Bumi Restu, 1977) 44

Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) pada tahun 1920¹⁷. PPKB ini tidak lama kemudian pecah menjadi dua, yang pertama menamakan dirinya Revolusioner Vaksentral di bawah pimpinan Semaun dan Bergsma yang berkedudukan di Semarang. Satunya bernama Vaksentral yang berkedudukan di bawah pimpinan Suryopranoto dan H. Agus Salim. Vaksentral ini melakukan kegiatannya sampai pada masa pendudukan Jepang¹⁸.

Di masa pendudukan Jepang, yakni pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mengeluarkan peraturan tentang larangan organisasi yang bergerak dalam lapangan politik mengadakan pertemuan. Peraturan ini kemudian disusul dengan peraturan tanggal 20 Mei 1942 yang berisi tentang pemberhentian kegiatan organisasi politik termasuk Partai Sarekat Islam. Organisasi yang bermafaskan keislaman seperti Muhammadiyah, NU, Al-Islam, Persatuan Umat Islam juga terkena larangan ini¹⁹. Larangan-larangan ini mengakibatkan kaum buruh tidak dapat melakukan kegiatannya untuk memperjuangkan perbaikan hidupnya.

✓ Sebagaimana diketahui pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Proklamasi ini dijadikan sebagai modal bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari ikatan penjajah dan

¹⁷ PPKB ini diketuai oleh Semaun, Suryopranoto dan H. Agus Salim. Dua nama yang disebut terakhir adalah tokoh dari Serikat Islam. Lihat, CST. Kansil, *Perjuangan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta ; Erlangga, 1988)127

¹⁸ *Ibid.*,130

¹⁹ Undang-undang No. 3, tanggal 20 Maret 1942

mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai negara yang merdeka. Sesudah proklamasi ini terjadi pertempuran dimana-mana, yaitu perlawanan rakyat melawan kolonial Belanda yang bermaksud menguasai Indonesia kembali.

Negara Indonesia yang baru menyatakan kemerdekaannya menggunakan sistem administrasi peninggalan penjajah dan kurangnya pengalaman bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan, mengakibatkan pemerintah kurang mampu melaksanakan tugas negara. Dalam kondisi seperti ini mendorong munculnya pergolakan guna menumbangkan pemerintah yang sudah berkuasa.

Di daerah-daerah muncul laskar-laskar yang terdiri atas kesatuan-kesatuan bersenjata atau badan-badan perjuangan seperti **Hisbullah, Barisan Banteng dan lain-lain**. Badan-badan perjuangan tersebut tidak hanya berfungsi melakukan perjuangan melawan kekuatan yang mengancam keamanan negara, sehingga ideologi politik masing-masing badan perjuangan tersebut sering memisahkan dan menimbulkan pertentangan di antara mereka²⁰.

Bangsa Indonesia yang menghadapi kenyataan bahwa struktur masyarakat secara menyeluruh mengandung benih pertentangan antar kelompok. Di pandang dari sudut ini tidak berlebihan apabila perjuangan

²⁰ Marwati Joened poespongoro, Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993)120

bangsa Indonesia dianggap penuh dengan pertentangan atau pergolakan yang mempertaruhkan ideologi atau aliran politik²¹

Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia, negara-negara luar negeri belum mengenal serta mengetahui keadaan Indonesia yang sebenarnya, sehingga bangsa Indonesia berusaha mencari simpati dan sahabat agar mereka mau memahami perjuangan bangsa Indonesia. Pemerintah banyak menghadapi tentang baik dari luar maupun dari dalam sendiri, untuk itu dibutuhkan peranan bangsa Indonesia pada umumnya dan kaum buruh pada khususnya untuk turut aktif mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

Wakil Presiden Mohammad Hatta menandatangani maklumat tertanggal 3 November 1945 yang mendorong pendirian partai-partai politik di Indonesia, karena dengan partai politik aliran atau paham yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan dengan teratur.

Kalangan Islam menyambut maklumat pemerintah itu dengan mengadakan muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November 1945 yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Kongres memutuskan untuk mendirikan Majelis Syuro Pusat bagi umat Islam Indonesia yang diberi nama Masyumi.

Pendukung utama partai baru ini adalah Muhammmadiyah dan NU serta semua organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan keislaman baik

²¹. B.J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Grafity Press, 1985) 42

lokal maupun yang bersifat nasional, kecuali partai yang tidak mendukung. Dalam Mukhtamar itu diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia dan Masyumi yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia²². Adanya ikrar ini berarti eksistensi partai politik Islam selain selain Masyumi tidak diakui lagi. Dilihat dari komposisi personalia yang terlibat dalam kepemimpinan Masyumi, tampak sekali bahwa partai ini melibatkan seluruh fungsioner pasca kemerdekaan²³.

Pada tanggal 26 November 1946, Alimin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil mempersatukan organisasi buruh yang bernama Gabungan Sarekat Buruh Indonesia (Gasbi) dan Gabungan Sarekat Buruh Vaksentral (GSBV) yang baru saja terjadi perselisihan²⁴, menjadi organisasi buruh baru yang diberi nama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi). Sobsi ini kemudian disahkan pada tanggal 18 Mei 1947 dalam kongres pertamanya di Malang²⁵.

Keberhasilan PKI dalam menggalang persatuan kaum buruh dalam satu wadah organisasi buruh sehingga dapat dijadikan sebagai alat perjuangan PKI, membuat para tokoh umat Islam Indonesia umumnya dan

²² M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali, 1983) 64

²³ Personalia Masyumi yang pertama terbentuk antara lain ; Majelis Syura diketuai oleh Hasyim As'ari dan dibantu oleh Wakhid Hasim (NU), H. Agus Salim dan Jamil Jambek, Pengurus Besar Masyumi diketuai oleh Sukiman Wirjosanjoyo, dan dibantu oleh Moh. Natsir dan Abikusumo (SI), Lihat dalam Fakhri Ali dan Bahtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, (Bandung : Mizan, 1986), hal. 85

²⁴ Perselisihan itu diakibatkan oleh karena Gasbi dituduh terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Hal ini mengakibatkan organisasi buruh yang menjadi anggota dari Gasbi seperti Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan Laskar Buruh Indonesia (LBI) merasa tidak puas dan menyatakan keluar dari Gasbi dan akhirnya mereka membentuk gabungan organisasi buruh sendiri yang diberi nama GSBV.

²⁵ Sukarna, *Pembaharuan Gerakan Buruh Di Indonesia Dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, (Bandung, Alumni, 1979) 3

para tokoh Masyumi khususnya berkeinginan untuk turut menghimpun kaum buruh. Kaum buruh Islam yang selama itu masih terpendam, agar dapat menjadikan kekuatan yang berpotensi besar untuk turut serta mewujudkan tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Penggalangan kaum buruh Islam yang diharapkan untuk diwujudkan dalam satu wadah organisasi juga sesuai dengan ikrar Masyumi yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia yang banyak terlibat dalam dunia perburuhan. Umat Islam Indonesia tidak sedikit jumlahnya yang menjadi buruh di perusahaan-perusahaan atau jawatan-jawatan baik swasta maupun milik negara²⁶.

* Pada tanggal 10 Juni 1947, para tokoh Masyumi yang menaruh perhatian terhadap nasib kaum buruh Islam yang ada di Indonesia, mengadakan suatu pertemuan di Yogyakarta. Dalam pertemuan ini berhasil membuat kesepakatan untuk mendirikan organisasi buruh baru yang bernaifaskan ke Islaman.

Para tokoh Islam yang memperhatikan nasib kaum buruh, sebagai tindak lanjut pertemuan 10 Juni di Yogyakarta berhasil mengadakan kongres di kota Sala pada tanggal 27 November 1947. Dalam kongres ini berhasil dibentuk organisasi buruh yang bernaifaskan keislaman yang diberi nama Sarekat Buruh Islam Indonesia (SBII)²⁷.

²⁶ Program ini merupakan Hasil Karya Yusuf Wibisono.

²⁷ Para Tokoh Masyumi berhasil membuat kesepakatan mendirikan organisasi buruh yang bernaifaskan ke Islaman yang diberi nama Sarekat Buruh Islam Indonesia yang disingkat SBII, lihat anggaran dasar Asbindo

SBII yang baru lahir ini ketua umumnya dipercayakan pada Harus Alrasyid. Dia adalah sebagai salah seorang tokoh yang diakui sebagai perintis kemerdekaan oleh pemerintah. Dia pada tahun 1936 oleh pemerintah Kolonial Belanda di buang ke Digul dan pada tahun 1941 dipindah ke Australia. Dia baru bisa pulang ke tanah air setelah Indonesia merdeka yakni pada tahun 1946 dan pada tahun 1947 dia turut mempersiapkan berdirinya organisasi buruh Islam yang akhirnya bernama SBII ini.

Struktur organisasi SBII diputuskan berbentuk unitaris dengan pembagian seksi-seksinya yang terdiri dari Seksi Perkebunan, Seksi Industri dan Umum, Seksi Minyak dan Tambang, Seksi Pegawai Negeri, Seksi Perhubungan dan Transportasi dan Seksi Perusahaan Gula. Pimpinan ditingkat pusat disebut pengurus besar dan di tiap propinsi pengurus besar diwakili oleh konsulat-konsulat²⁸ dan ditingkat kabupaten atau kodya diwakili oleh komisariat serta ditiap perusahaan atau instansi dibentuk kring-kring²⁹.

Ideologi yang digunakan SBII adalah ideologi Islam³⁰. Ideologi sebenarnya adalah konsepsi manusia mengenai politik, ekonomi, sosial

²⁸ Konsulat adalah susunan pengurus SBII di tingkat propinsi atau daerah Tingkat I. Lihat Anggaran Dasar SBII

²⁹ Kring adalah bagian dari struktur pengurus SBII yang paling bawah atau yang berhadapan langsung dengan basis. Lihat juga anggaran dasar SBII

³⁰ Pengertian Ideologi Islam menurut Yusuf Qardawi bahwa Islam harus dijadikan pedoman perjuangan diseluruh lapangan duniawi dan rokhani. Akidah masyarakat harus Islami, begitu juga dengan sumbangan hidupnya, paham dan pikirannya yang Islam. Sedangkan pengertian Ideologi adalah mengenai konsepsi manusia tentang politik, ekonomi dan sosial dan budaya yang diyakini kebenarannya dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lihat, Yusuf Qardawi, *Pedoman Ideologi Islam*, (Bandung; Gema Risalah Press, 1988) 57

dan budaya yang diyakini kebenarannya untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Adapun Islam adalah suatu agama dan yang menjadi pemikir dari agama itu adalah Tuhan dengan perantara wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahyu ini yang dijadikan pedoman hidup manusia untuk mengatur secara garis besar tata kehidupan dalam berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam apabila dijadikan dasar perjuangan, maka masih membutuhkan pemikiran manusia untuk mengatur

secara garis besar tata kehidupan dalam berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam apabila dijadikan dasar perjuangan, maka masih membutuhkan pemikiran manusia untuk menemukan sistem yang baik dalam mengatur pelaksanaannya yang sesuai dengan ilmu dan perkembangan zaman³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penggunaan Islam sebagai ideologi SBII, berarti cita-cita Islam dan hukum-hukum Islam dijadikan sebagai dasar perjuangan terutama yang mengenai masalah cara manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta dan cara berpolitik secara Islam³².

SBII mempunyai tujuan menyusun dan memelihara masyarakat yang menuju pada kemakmuran bersama. SBII berusaha menghilangkan perselisihan dalam lapangan perburuhan, menyusun kaum buruh Islam dalam satu ikatan yang kokoh, kuat dan tidak terpecah belah dan

³¹ Ibid, 1988, 84

³² Dasar perjuangan SBII baik dalam berjuang untuk masalah politik maupun perburuhan telah diatur dalam Anggaran Dasar SBII

memelihara jiwa cinta bangsa dan tanah air serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia³³.

SBII untuk mencapai cita-cita dan melaksanakan perjuangannya dengan jalan memberi pendidikan, penerangan Islam dan perburuhan dengan lisan atau tulisan kepada anggotanya. Organisasi tersebut menginsafkan anggotanya akan kedudukannya dalam produksi, hak dan kewajibannya serta akan gunanya usaha bersama, mendirikan kring-kring di tiap-tiap pusat perburuhan dan menggolong-golongkannya dalam satu seksi bagi yang sejenis serta memimpinya secara sentral³⁴.

B. Perpecahan dalam Tubuh SBII tahun 1956

Pada tahun 1950, Indonesia sebagai negara kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan mendasarkan pada undang-undang dasar sementara yakni UUDS 1950. Menurut undang-undang ini, hidup mati suatu kabinet sepenuhnya ditentukan oleh besar kecilnya dukungan yang diperoleh dalam parlemen. Dimasa kehidupan alam liberalisme yang demikian menurut manusia untuk mengutamakan diri pribadi atau golongan sendiri. Akibat dari pengaruh liberalisme seperti ini tercermin dalam cara kerja negara-negara seperti dalam DPR yang anggota-anggotanya ingin menang sendiri atau hanya ingin mementingkan

³³ Tujuan dari organisasi diatur dalam AD-nya pasal 2

³⁴ Masalah cara untuk mencapai cita-cita diatur dalam pasal 3

kepentingan golongannya. Alam liberalisme ini juga mempengaruhi keutuhan Masyumi³⁵.

Masyumi mengalami guncangan pada bulan Mei disaat kongresnya di Palembang. Pada saat kongres ini, NU meninggalkan Masyumi dalam kongres dan menyatakan keluar. Keluarnya NU dari Masyumi ini disebabkan oleh kekecewaan para anggota NU karena mudarnya peranan majelis syura yang didominasi NU dan lebih kecewa lagi dengan tidak diperhatikannya usulan NU yang ingin mendudukan wakilnya sebagai menteri agama oleh pimpinan Masyumi. Tokoh-tokoh Masyumi yang keluar dan masuk NU seperti Subarjo, Burhanudin dan Sunaryo³⁶.

Mokhtar Gozali mulai mempunyai anggapan bahwa SBII yang mempunyai hubungan dengan Masyumi hanya mementingkan kepentingan politik saja sehingga masalah yang pokok bagi organisasi buruh yakni masalah peningkatan kesejahteraan anggotanya terlupakan.

Mukhtamar SBII ke dua dilangsungkan pada tahun 1953 di Surabaya. Dalam mukhtamar ini Mokhtar Gozali berharap agar mukhtamar ini bisa melepaskan SBII sebagai organisasi buruh yang independent. Usulan Mokhtar Gozali ini tidak disetujui oleh Yusuf Wibisono yang juga menjabat sebagai anggota pengurus besar Masyumi. Yusuf Wibisono berpendapat bahwa SBII dalam memperjuangkan nasib anggotanya masih diperlukan bantuan dan bimbingan dari Masyumi.

³⁵ Deliar Noer, 1987, 352

³⁶ Kacung Marijan, Quo Vadis NU, NU Setelah Khittah 1926, (Surabaya, Erlangga, tt) 26

Perbedaan pendapat ini mampu diredam dan hanya menimbulkan kelompok-kelompok dalam organisasi³⁷. Yusuf Wibisono dalam kongres ke dua ini akhirnya terpilih sebagai ketua umum menggantikan posisi Moh. Daljono yang menjadi ketua mulai tahun 1948. Yusuf W. adalah tokoh Masyumi yang pada tahun 1946 menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dalam kabinet Syahrir ke tiga. Dia yang dianggap sebagai ekonomi Masyumi pada tahun 1948 menjabat sebagai Direktur Banking Treading Corp. di Yogyakarta dan pada tahun 1951 yakni pada masa kabinet Sukiman, dia diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Mukhtamar SBII ke tiga dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1954 dan yang menjadi perdebatan dalam sidang-sidangnya adalah masalah independensi ini juga masuk dalam agenda pembicaraan pada mukhtamar SBII ke empat yang dilangsungkan di Solo pada tahun 1955

Puncak masalah ini terjadi pada mukhtamar SBII ke lima yang dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1956. Dalam mukhtamar ini Mokhtar Gozali, Endang Razad dan Daud Badaruddin setelah tidak berhasil menjadikan SBII sebagai organisasi buruh baru yang independent menyatakan keluar dari SBII dan pada tanggal 9 Desember 1956, mereka mendirikan organisasi buruh baru yang diberi nama Kesatuan Buruh Islam Indonesia (KBIM)¹³⁸.

³⁷ Deliar Noer, 1987, 56

1

³⁸ Ibid, 56

C. Lahirnya GASBIINDO

SBII menjadi rapuh setelah perpecahan ini dengan diangkatnya Yusuf Wibisono menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Ali-Roem-Idham dalam tahun 1956-1957, praktis SBII hanya diurus oleh pembantu-pembantunya seperti : S.Narto yang menjabat sebagai Sekretaris Jendral, Ismail Napu, Broto dan lain-lain. Kondisi seperti ini lebih dipersulit lagi dengan munculnya pemberontakan PRRI yang melibatkan tokoh-tokoh Masyumi seperti Syafruddin, Natsir, dan Burhanudin Harahap. Keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam PRRI ini hanya mempersulit kedudukan Masyumi dan organisasi yang terkait dengannya. Pimpinan pusat Masyumi berpendapat bahwa pemberontakan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan demokrasi tetapi sebaliknya partai ini juga berpendapat bahwa Presiden Sukarno dan pemerintah pusat telah melanggar undang-undang dasar sementara karena telah mengangkat diri pribadinya menjadi formatir pada tahun 1957. Pendapat Masyumi ini dinyatakan dalam suatu pernyataan pada tanggal 28 Februari 1958 yang dalam intinya menyatakan bahwa baik pemerintah pusat maupun PRRI telah melanggar undang-undang dasar dan oleh sebab itu cara sebaik baiknya untuk menyelesaikan keadaan adalah apabila kedua belah pihak antara pemerintah dan PRRI kembali mematuhi undang-undang³⁹.

Yusuf W. tidak menyetujui pernyataan Masyumi ini, ia berpendapat bahwa Masyumi sebagai partai politik harus bersikap tegas terhadap

³⁹ Merdeka, 7 Februari 1958

pemberontak, termasuk terhadap pemimpin Masyumi yang terlibat dalam pemberontakan itu. Keterlibatan mereka dalam pemberontakan justru melanggar prinsip-prinsip Masyumi dan oleh sebab itu tidak dapat dibiarkan. Yusuf Wibisono juga berpendapat bahwa Masyumi dalam kenyataannya setelah dipimpin oleh Natsir selalu mengalami penurunan. Dia merasa bahwa sudah tidak pada tempatnya berada dalam Masyumi dan mulai tanggal 1 Januari 1959 dia mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai anggota pengurus besar Masyumi⁴⁰. Langkah-langkah yang diambil Yusuf W. ini membawa dampak terhadap keberadaan SBII, karena ia menjabat sebagai ketua umumnya.

Presiden Sukarno menjelaskan gagasannya ketika proses integrasi bangsa hampir saja lepas dari keterikatan dengan pemerintah. Hal ini berpusat pada masalah demokrasi yaitu demokrasi yang dilihatnya tepat untuk Indonesia. Dalam suatu wawancara dengan koresponden luar negeri di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957, ia mengatakan bahwa demokrasi barat tidak cocok untuk Indonesia. Pendapatnya ini diperjelas dengan keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang dinyatakan bahwa konstituante dibubarkan dan kembali pada UUD 1945 dan sejak ini diterapkannya demokrasi yang sesuai dengan alam Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin⁴¹.

Dekrit Presiden 5 Juli ini mempunyai manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk mempunyai arti penting bagi

⁴⁰ Merdeka, 28 November 1958, Lihat Juga Merdeka 2 Januari 1959.

⁴¹ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta; LP3ES, 1978) 34-35

kehidupan gerakan buruh di Indonesia pada umumnya dan SBII pada khususnya. Dekrit Presiden menempatkan kaum buruh yang semula dalam lapangan politik cukup diwakili oleh partai politik yang sealiran kini menjadi diakui sebagai golongan fungsional dalam masyarakat⁴², serta diikutkan dalam lembaga-lembaga negara.

Presiden Sukarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", menjelaskan prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin dalam dua kategori yaitu: (1) tiap-tiap orang wajib berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara, (2) tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara⁴³.

Pada tanggal 31 Desember 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan penetapan presiden (Penpres) no. 7 yang berisi tentang hak-hak hidup partai politik. Penpres tentang kepartaian ini tampaknya mempunyai dampak terhadap bubarnya Masyumi dan PSI. Penpres ini kemudian disusul dengan Keputusan Presiden (Kepres) tanggal 19 Agustus 1960 no :20/1960 yang dengan resmi meminta pembubaran Masyumi dan PSI⁴⁴.

Situasi politik yang demikian dimanfaatkan oleh para tokoh SBII untuk menata organisasi. Pada tanggal 23-26 Januari 1960 SBII mengadakan mukhtamar ke enam di Yogyakarta. Dalam mukhtamar ini berhasil diputuskan bahwa SBII adalah organisasi buruh yang

⁴² Duta Masyarakat 6 April 1960

⁴³ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 2*, (Jakarta : Pan. Penerbit DBR) 19

⁴⁴ Syafi'i Ma'arif, 188-189

independendan non-partai. Bentuk organisasi juga diubah dari unitaris menjadi federasi dan membagi SBII menjadi enam sarekat buruh yaitu : Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbupri), Sarekat Buruh Minyak dan Tambang (Serbumit), Sarekat Sekerja Pegawai Negeri dan Daerah Otonom (Sespendo), Sarekat Buruh Perhubungan dan Transportasi (SBPT) dan Sarekat Buruh Pabrik Gula (SBPG)⁴⁵.

Keputusan bahwa SBII sebagai organisasi buruh yang independen dan non-partai berarti SBII sudah tidak lagi terikat dengan partai politik Masyumi. Keputusan ini diambil karena disadari apabila masih terikat dengan Masyumi kepentingan anggotanya akan terombang-ambing dengan kedudukan Masyumi yang tidak menentu⁴⁶.

Yusuf Wibisono berpendapat bahwa kepentingan buruh berbeda dengan kepentingan partai politik dan ia merasa bahwa lebih tepat bagi SBII untuk melepaskan diri dari keterikatannya dengan Mayumi. Pendapat Yusuf ini berbeda dengan sebelumnya yakni pada tahun 1953, ia mempertahankan Masyumi sebagai organisasi induk sampai dengan tahun 1959 ia tetap punya pendirian seperti itu. Perubahan pendapat Yusuf W. ini disebabkan oleh kekecewaannya terhadap sikap Masyumi yang ditujukan terhadap pemberontakan PRRI yang melibatkan kawan-kawannya dan kecewa terhadap sikap Masyumi yang menganggap bahwa Soekrano telah melanggar Undang-undang⁴⁷.

⁴⁵ Solikhin Salam, 1964, 47

⁴⁶ Ibid, 49

⁴⁷ Harian Duta Masyarakat, 4 April 1961

Lepasnya iaktan SBII dari Masyumi, menunjukkan adanya usaha dari para tokohnya untuk menyelamatkan organisasi dari kehancuran. Usaha inii tampak pada hasil keputusan rapat Masyumi tanggal 8 September 1959 di Jakarta yang memutuskan untuk melepaskan semua ikatan terhadap anggota-anggota istimewa partai, termasuk organisasi yang berada dibawah nauangannya. Keputusan ini untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap Masyum⁴⁸.

Bentuk unitaris diubah menjadi bentuk federasi karena organisasi yang berbentuk unitaris dianggap kurang berhasil dalam menjalankan keputusan organisasi. Dalam bentuk unitaris, segala sesuatu tindakan menunggu instruksi dari pusat, hal ini mengakibatkan gerak organisasi menjadi lamban sehingga sifat progresifnya berkurang. Hal ini juga disebabkan karena SBII sudah mencakup sektor perburuhan yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dalam bentuk federasi dapat memberikan otonomi yang lebih besar terhadap setiap sarekat buruh anggotanya walaupun tetap mendapat pengawasan dari pusat⁴⁹.

Pada tanggal 1 April 1960, Yusuf Wibisono, Agus Sudono dan Wartomo Dwidjojuwono ditunjuk oleh Soekarno untuk mewakili golongan buruh duduk sebagai anggota DRR-GR. Mereka menerima penunjukkan inii karena dianggap sebagai kesempatan pertama bagi SBII untuk berperan dalam pemerintahan. Penunjukkan mereka membuktikan bahwa

⁴⁸ Solikhun

⁴⁹ Solikhin Salam, hal. 48

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

posisi SBII sudah terlepas dari kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh pengaruh kemelut yang dialami Masyumi⁵⁰.

SBII yang sudah independent mencoba untuk mendekati para tokoh KBIM dan meminta agar mereka mau bergabung kembali kedalam SBII, karena posisi SBII sudah seperti yang mereka harapkan. Sebagian anggota KBIM bersedia bergabung kedalam SBII seperti : Endang Razad, Anwar Mokhtar dan Amir Sanpulauan.

Dalam tahun 1961 PB. SBII dituntut mengadakan sidang untuk menyusun program jangka pendek dan mengubah nama SBII yang sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk organisasi dan juga dikarenakan bergabungnya kembali sebagian anggota KBIM ke dalam SBII.

Pada tanggal 5 – 7 November 1961, PB. SBII berhasil mengadakan Sidang Majelis Nasionalnya yang pertama dan dilaksanakan di Jakarta. Dalam Sidang Majelis Nasional ini nama SBII diubah menjadi Gabungan Sarekat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo)⁵¹.

⁵⁰ Duta Masyarakat, 4 April 1961

⁵¹ Sarekat Buruh Islam Indonesia yang didirikan tanggal 27 November 1942 diubah menjadi Gabungan Sarekat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) Lihat, Anggaran Dasar Gasbiindo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

Perjuangan Gasbiindo Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Tahun 1961 - 1964

A. Situasi Politik Menjelang tahun 1961

Kalau kita lihat dinamika politik pada masa Demokrasi Liberal antara lain dapat ditempuh melalui jumlah pergantian kabinet yang demikian cepat dari kabinet yang satu ke kabinet yang lain.

Sebagai mana yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa sejak Indonesia merdeka tidak kurang dari 25 kabinet yang telah memerintah di Indonesia. Dari jumlah yang ada itu yang berhasil memerintah selama 12-13 bulan sebanyak 7 kabinet, sedangkan berumur 12 kabinet berumur 6-11 bulan, dan yang 6 kabinet hanya berumur 1-4 bulan⁵². Keadaan yang demikian inilah yang dijadikan standart ketidakstabilan politik pada masa itu.

Sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi untuk mengikut sertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon yang harus duduk dalam pemerintahan, maka pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama sejak Indonesia merdeka. Rencana Undang-undang pemilu ini ditanda tangani oleh parlemen pada tanggal 25 November 1952 dan disahkan pada tanggal 4 April 1953.

⁵² M. Rusli Karim, hal. 113

Rancangan ini disahkan dan dirancang oleh kabinet Wilopo. Tetapi tidak lama kemudian kabinet ini jatuh dan diganti oleh kabinet Ali yang pertama. Masa kabinet inipun jatuh sebelum diselenggarakannya pemilu. Kabinet ini digantikan oleh kabinet Burhanudin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 kabinet ini adalah kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya; Sedangkan PNI menjadi partai oposisi. Pada masa kabinet inilah diselenggarakan pemilihan umum yang pertama. Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada bulan maret 1956 dan digantikan oleh kabinet Ali Satromijoyo yang kemudian dikenal sebagai kabinet Ali II, dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956⁵³.

Pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang menghasilkan sebanyak 272 anggota DPR yang masing-masing anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk.

Dalam hal ini pemilihan umum ternyata tidak dapat membawa perbaikan dalam kehidupan politik. Kestabilan pemerintah tidak dapat tercapai karena DPR hasil pemilu itu seperti juga DPRS, terpecah-pecah dalam sekian banyak partai. Sehingga setiap kabinet tergantung kepada dukungan yang ikut dalam koalisinya.

Pada akhir tahun 1956, menteri-menteri yang berasal dari Masyumi mengundurkan diri dari kabinet. Tapi NU masih menduduki kursinya. Hal ini

⁵³ Daniel Daki Dae, *Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik*, (Jakarta; LP3ES, 1981) 17-40

menambah memperuncingnya ketegangan antara NU dan Masyumi dalam pelaksanaan tugas pemerintah sehari-hari. Walaupun demikian mereka dapat bersatu dalam konstituante dalam rangka membela Islam sebagai dasar negara merdeka berjuang mati-matian agar Islam ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pengunduran diri Hatta dan para menteri dari partai Masyumi serta kecenderungan masyarakat luar Jawa anti Soekarno, tampak jelas ketidak puasan masyarakat luar Jawa terhadap sistem pemerintahan Soekarno.

Keinginan Soekarno untuk menciptakan demokrasi terpimpin dimulai sejak bulan Oktober tahun 1956, pada tahun ini presiden Soekarno sudah mulai mengotak-atik konsepnya tentang demokrasi terpimpin⁵⁴. Tetapi gagasan ini baru terealisasi pada tanggal 5 Juli 1959. Hal yang mendorong Soekarno untuk menciptakan demokrasi terpimpin itu adalah kekecewaan Soekarno terhadap jalannya demokrasi Liberal. Menurut pengamatan Soekarno, Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa masyarakat adil dan makmur. Dalam demokrasi Liberal, kata Soekarno masing-masing golongan politik saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Sedangkan Soekarno ingin melihat bangsa Indonesia bersatu dalam rangka kesatuan yang berwilayah

⁵⁴ Boland, 1985, 90

dari Sabang sampai Merauke, dan Soekarno ingin menciptakan negara Indonesia adil dan makmur yang memberikan kebahagiaan bagi semua warga negara.

Dalam masa demokrasi terpimpin partai-partai politik sengaja dibuat oleh Presiden Soekarno tidak berdaya sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara baik.

Pada masa demokrasi terpimpin partai-partai Islam yang masih dapat bernafas antara lain : NU, PSII, Perti dan Masyumi. Partai Masyumi adalah partai Islam yang paling besar pada waktu itu.

Peranan Masyumi pada masa awal demokrasi terpimpin adalah besar sekali bahkan partai ini terkenal dengan partai yang paling agresif terhadap ide-ide Soekarno yang tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Partai Islam yang dapat disebut memperjuangkan Islam di Indonesia terbukti hanya Masyumi.

Disamping itu ada satu organisasi yang erat hubungannya dengan masyumi yaitu SBII yang diganti nama dengan Gasbiindo. Yang bertujuan memperjuangkan nasib kaum buruh, yang diketahui oleh Yusuf Wibisono⁵⁵.

⁵⁵ Deliar Noer, 1987, 356

B. Perjuangan Gasbiindo Pada Lapangan Perburuhan.

Gasbiindo sebagai organisasi buruh dalam perjuangannya sudah barang tentu membela kepentingan kaum buruh dalam rangka peningkatan kesejahterannya, kesejahteraan buruh di Indonesia umumnya mulai rendah, hal ini tampak pada kesehatannya belum diperhatikan dari pihak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor : (1) Faktor keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia, (2) Umumnya buruh tenaga kerja mempunyai tidak terlatih, (3) Lemahnya sosial ekonomi dari pihak buruh sehingga terpaksa tunduk pada kebijaksanaan yang diberikan oleh pihak pengusaha walaupun hasil yang diperolehnya kurang memadai, (4) Kurangnya pengertian dari pihak pengusaha terhadap arti dan manfaat dari kesejahteraan buruh dalam perusahaan dan lemahnya kemampuan perusahaan sehingga tidak mampu memberikan kesejahteraan pada buruh-buruhnya⁵⁶.

Gasbiindo dalam memperjuangkan nasib kaum buruh dengan jalan mengajukan usul-usul atau saran-saran pada pihak majikan atau perusahaan dalam bentuk resolusi. Pemerintah dalam hal ini ditempatkan dalam posisi sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung dan perdamaian yang secara singkat dapat dikatakan bahwa pemerintah berperan sebagai pengayom bagi

⁵⁶ Kesejahteraan Buruh, Dinas Perburuhan Daerah TK. I Jatim, 27

semua pihak dalam masyarakat pada umumnya dan pihak yang terlibat pada khususnya⁵⁷.

Di dalam sidang Majelis Nasional Gasbiindo yang pertama di Jakarta pada tanggal 5-7 November 1961, menghasilkan struktur kepengurusan yang jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Ketua umumnya tetap dipercaya pada Yusuf Wibisono. Dengan sekretaris Jendralnya Wartomo Dwijoyowono dan wakil sekretaris jendral dipercaya ada Agus Sudono. Sekretaris I dan bendahara dipercayakan pada Mc Annas. Sekretaris II dipegang Nandi Sutedjo, Sek III dipegang Mukhtar Anwar dan Harun Al-Rasyid.

Struktur kepengurusan dalam pengurusan dalam pengurus besar dibagi menjadi beberapa bidang. Bidang urusan wanita diketuai oleh Ny. **Maryati Adnan yang dibantu oleh Nn. Jojoh Rokhaniah SH.** Dengan sekretaris Nn. Badia'ah yang dibantu Ny. Sulaiman dan bendahara yang dipegang Ny. Zainab Halim yang dibantu oleh Ny. Supato. Anggota-anggotanya yaitu Ny. Agus Sudono, Ny. Nardi Sutejo, Ny. Saroji Ganap dan Ny. Kaumbolon. Bidang pendidikan kader, ketuanya dipegang Sudjono Harjo Sudiro, SH. Dan dibantu Drs. Sunhaji dan Amir Sampulungan, sekretarisnya dipegang Marsal Bonanidan Bakir Hasan. Bidang hubungan luar negeri ketuanya dipegang Abdul Gani dengan sekretaris Zainal Abidin. Bidang sosial ekonomi diketuai Witomo Dwijoyowono dengan sekretaris Drs. Abdul

⁵⁷ Keputusan Seminar tentang Hubungan Perburuhan Pancasila di Jakarta tanggal 4-7 Desember 1974

Latif. Bidang penerangan diketuai Mc Annas dengan sekretaris Heriansah dan Hidayat. Bidang hubungan perburuan diketuai Mukhtar Anwar dengan sekretaris Marsal Bohani. Bidang organisasi diketuai Endang Ronad dengan sekretaris. Noer Sofyan dan Musirin.

Penempatan Agus Sudono pada posisi wakil sekretaris jendral adalah karena ia sebagai tokoh muda yang banyak pengalaman, diharapkan mampu membantu pelaksanaan roda organisasi. Pengalaman (AS), ini terlihat yakni pada tahun 1956 ia mengikuti Youth Leadership Training di ahmedabad India selama tiga tahun yang diselenggarakan WAY (World Assemble of Youth). Pada tahun 1957 dia juga mengikuti Labour Leadership Training di St. John Colege University Annapolis Amerika Sarekat selama 6 bulan. Dalam perjalanan pulang dari Amerika Sarekat dia singgah di Jepang, Filipina untuk mempelajari gerakan sarekat buruh disana. Dalam bulan Agustus 1958 di mengikuti delegasi SBII untuk menghadiri konfrensi ICFTU se Asia di Malaya. Pada bulan April 1960 dia pergi ke Geneva kemudian ke Brussel, Italia, Libanon, Perancis dan Mesir. Untuk mempelajari organisasi-organisasi buruh disana. Agus Sudono juga sebagai Sarekat buruh minyak Tambang.(Serbumit)

Hasil sidang ini dalam masalah kesejahteraan butuh yaitu diputuskannya beberapa masalah yang dijadikan sebagai program organisasi. Permasalahan itu mencakup masalah kesejahteraan buruh, tunjangan ganti rugi, tunjangan akibat penindasan, dan tunjangan akibat

resiko pekerjaan. Keputusan di atas, yang mendesak untuk segera diselesaikan untuk segera diselesaikan adalah masa upah buruh naiknya harga sandang, dan peraturan tentang tunjangan masalah kemahalan harga setempat⁵⁸.

Gasbiindo memutuskan untuk segera mendesak kepada pemerintah untuk menaikkan upah buruh dan menekan naiknya harga sandang pangan serta menuntut dikeluarkannya peraturan tentang tunjangan kemahalan setempat.

Tuntutan Gasbiindo ini disampaikan melalui resolusi pada tanggal 1 Desember 1961 yang ditunjukkan kepada presiden selaku Komando Operasi Ekonomi. Dalam hal ini Gasbiindo memohon perhatian presiden tentang upah buruh yang dianggap oleh Gasbiindo sudah tidak sesuai dengan kemanusiaan dan mendesak untuk segera diberikan kenaikan upah yang sesuai dengan kenaikan kebutuhan pokok.

Resolusi yang dikeluarkan Gasbiindo di atas kemudian disusul oleh resolusi yang dikeluarkan oleh salah satu sarekat buruh anggota Gasbiindo yakni Sespendo yang menuntut diberikannya tunjangan kemahalan setempat serta menuntut diintensikannya penyaluran bahan pokok agar dapat dibeli dengan harga yang sesuai dengan pendapatan dana buruh. Resolusi ini

⁵⁸ Istilah Tunjangan Kemahalan setempat digunakan untuk menyebutkan suatu tunjangan yang diakibatkan adanya harga barang yang tidak sama antara tempat yang satu dengan tempat yang lain

tentang tanggal 5 Desember 1961 yang dialamatkan pada menteri pertama pada bertambah mahalny harga kebutuhan bahan pokok yang sudah demikian melonjak sehingga sudah tidak terjangkau daya beli para pegawai⁵⁹.

Mulyadi Djojomartono sebagai menteri kesejahteraan rakyat selalu menanggapi resolusi yang dikeluarkan Gasbiindo menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan tuntutan dari masyarakat atau organisasi yang mewakilinya. Dalam hal ini pemerintah mencoba untuk memahami Gasbiindo khususnya dan kaum buruh Indonesia perlu diadakan pembenahan, untuk itu Mulyadi menghimbau kepada segenap kaum buruh Indonesia hendaknya meningkatkan poduksi dan dia juga berharap kepada organisasi-organisasi buruh yang ada agar lebih meningkatkan kualitas anggotanya, yaitu dengan jalan pembinaannya ditingkatkan khususnya bagi buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan negara. Agar lebih meningkatkan produksi sehingga pendapatan negara dapat meningkat dan demikian pemerintah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih banyak lagi buruh-buruhnya dan mampu meningkatkan pembangunan nasional yang programnya telah diresmikan oleh presiden tanggal 1 Januari⁶⁰.

Pada tanggal 27 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang kenaikan upah pekerja-pekerja negara dan buruh yang

⁵⁹ Gasbiindo mendesak kepada pemerintah, Lihat Keputusan Sidang Majelis Nasional Pertama Gasbiindo

bekerja pada perusahaan negara. Kenaikan upah ini mencapai 10 % yakni dari 120,- menjadi 132,-. Ahem Erninprija sebagai menteri perburuhan berpendapat bahwa kenaikan upah sebesar 10 % ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam bekerja⁶¹.

Tuntutan kenaikan upah yang dilakukan Gasbiindo terhadap pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri atau badan perusahaan negara tetapi juga bagi buruh-buruh swasta. Hal ini terlihat pada resolusi yang dikeluarkan Gasbiindo pada tanggal 17 Juni 1962. Resolusi itu mendesak pada perusahaan-perusahaan swasta untuk menaikkan upah buruhnya. Kenaikan buruh upah swasta yang dituntut ini harga disesuaikan dengan kenaikan upah yang telah diberikan oleh pemerintah kepada para pegawai negeri buruh yang bekerja di perusahaan negara⁶².

Pemerintah dalam menghadapi kenyataan bahwa kondisi kesejahteraan buruh sudah mendesak untuk diadakan perubahan kearah yang lebih baik dan dengan adanya desakan dari beberapa sarakat buruh di Indonesia termasuk Gasbiindo maka pada tanggal 19 Januari 1962. Mulyadi menghimbau kepada pihak swasta agar dalam memberikan upah buruhnya mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yakni menaikkan

⁶⁰ Duta Masyarakat, 10 Desember 1961

⁶¹ Merdeka, 25 Desember 1961

⁶² Hasil Selengkapnya Lihat Lampiran Resolusi Gasbiindo Tentang Perburuhan

upah buruhnya sebesar 10 %. Hal yang senada juga diungkapkan oleh menteri perburuhan⁶³.

Gasbiindo dalam sidang majelis nasionalnya yang kedua di Semarang berhasil memutuskan program organisasi dalam masalah konsolidasi organisasi, Pendidikan kader, Research, kesejahteraan buruh berhasil di putuskan untuk membentuk yayasan. Keputusan ini berbunyi sebagai berikut :

1. Membentuk dengan segera yayasan yang diberi nama Yayasan Perbendaharaan (YKP).
2. Membuka dengan resmi cabang-cabang di daerah sesuai dengan tingkat pimpinan.
3. Memberikan tuntutan dan petunjuk-petunjuk terhadap usaha-usaha kesejahteraan sesuai dengan perubahan keadaan⁶⁴.

Yayasan ini dibentuk karena Gasbiindo berpendapat bahwa masalah kesejahteraan tidak hanya menjadi beban dari pihak majikan, tetapi buruh itu sendiri dan sarekat buruh juga berkewajiban untuk mengusahakan peningkatan kesejahteraan, sehingga masalah kesejahteraan buruh itu hanya tergantung pada pihak majikan.

Yayasan kesejahteraan dan perbendaharaan ini bertujuan untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan dan diharapkan mampu

⁶³ Kesejahteraan Buruh di Indonesia, (Surabaya, Dinas Perburuhan Daerah Tk I Jatim, 1975)

⁶⁴ Hasil Selengkapnya Keputusan Sidang Majelis Nasional Gasbiindo ke II, Lihat Lampiran

memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Usaha-usaha yang dijalankan demi peningkatan kesejahteraan buruh ini menyangkut masalah penyediaan transportasi untuk antar jemput buruh ke tempat kerja pendirian barak untuk tempat pemondokan buruh dan mendirikan balai pengobatan⁶⁵.

Pada bulan 1964 sudah berdiri 84 cabang YKP di seluruh Indonesia, akan tetapi cabang-cabang yayasan ini banyak yang kurang dat berfungsi seperti yang diharapkan, terutama yang ada didaerah-daerah. Banyak faktor penyebab kurang optimalnya kerja yayasan ini untuk merealisasikan programnya seperti kurang adanya kerja sama yang baik antara yayasan dan majikan, pendanaan yang kurang dan pengelolaannya yang kurang profesional⁶⁶.

Kondisi yang seperti ini dilihat pada YKP cabang pekalongan yang memprogramkan pendirian balai pengobatan. Akan tetapi tidak dapat di realisasikan. Kegagalan ini diakibatkan oleh tidak adanya dana untuk melaksanakan program itu. Para anggotanya yang kebanyakan buruh di pabrik tekstil kurang mempunyai kesadaran untuk membayar iuran anggaran, sehingga keuangan organisasi yang ada tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut. Dana pengurusannya juga tidak mampu mengadakan pendekatan pihak majikan untuk meminta bantuan dana.

⁶⁵ Kesejahteraan Buruh, 1975, 34

⁶⁶ Harian Merdeka, 14 April 1964

Kerjasama yang tidak terjalin dengan baik antara pihak yayasan dengan pihak majikan ini terlihat sewaktu yayasan membutuhkan dana, pihak majikan tidak mau memberikan kebutuhannya. Masalah ini terjadi karena pihak majikan kurang menyadari bahwa produksi perusahaan dapat meningkat apabila para buruh yang mengerjakannya dalam kondisi yang baik.

Dana organisasi kebanyakan dari adanya bantuan pemerintah sehingga Gasbiindo dalam mengambil keputusan atau sikap, baik logis maupun tidak logis dipengaruhi oleh faktor pemberi keuangan tersebut. Masalah inilah sebagai salah satu penyebab Gasbiindo tidak mampu melepaskan sikapnya yang selalu mendukung pemerintah.

Dalam AD dan ART GASbiindo sudah diatur masalah perbendaharaan organisasi yaitu bahwa perbendaharaan organisasi diperoleh dari uang pangkal⁶⁷. Uang pangkal Gasbiindo sebesar Rp. 2,40,- Gasbiindo yang diserahkan kepada pengurus pusat sebesar Rp. 2,40,- Gasbiindo yang menarik uang iuran organisasi anggota, akan tetapi hal ini kurang dapat berjalan dengan baik. Mengingat kondisi buruh yang sangat memprihatinkan, hal ini menyebabkan Gasbiindo lebih aktif mencari sumbangan. Sumbangan ini bisa digali dari pihak majikan, Donatur dan Pemerintah⁶⁸.

⁶⁷ Uang Pangkal adalah uang yang harus dibayar oleh anggota pada waktu pertama kali diterima menjadi anggota

⁶⁸ Masalah para donatur ini lihat anggaran dasar Bab IX Pasal 12

Sidang majelis nasional Gasbiindo yang ke-3 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16-19 April 1964. Sesuai dengan keputusan sidang ini dan hasil rapat pengurus besar dalam bulan Juni 1964, susunan pengurus besar diubah sebagai berikut : ketua umum tetap dipegang Yusuf Wibisono, Ketua I dipegang Wartono Dwijoyowono, Ketua II dipegang Andi Mapasela, sedang sekjen dipercayakan pada Agus Sudono, wakil sekjen I dipegang Mc Annas, wakil sekjen II oleh Mokhtar Anwar, wakil sekjen III Nardi Sutedjo. Sekretarisnya Hanadi. Anggotanya pengurus besar dipercayakan kepada Harun Al-Rasyid, Sudjonno Harso Sudiro SH, Endang Rosyad, Mualief dan Ny. Maryati Adnan.

Sidang majelis ke-III ini menetapkan program yang menyangkut **kesejahteraan anggota diputuskan untuk meneruskan program terdahulu** yaitu mengenai masalah produksi pangan, gerakan mengubah, distribusi sandang pangan dan program yang bersifat baru seperti membentuk koperasi-koperasi di tiap-tiap daerah sesuai dengan tingkat pimpinan Gasbiindo. Keputusan itu berbunyi sebagai berikut :

“Untuk menguatkan perekonomian perburuhan, mengharapkan semua komisariat Gasbiindo segera mendirikan dengan resmi koperasi Gasbiindo, agar anggaran Gasbiindo dalam mendirikan kesejahteraan buruh tidak semata-mata tergantung pada pihak majikan”⁶⁹

⁶⁹ Hasil Keputusan Sidang Majelis Gasbiindo ke III selengkapnya, lihat lampiran

Koperasi Gasbiindo merupakan suatu badan yang didirikan oleh beberapa orang badan anggota Gasbiindo yang sekaligus menjadi anggotanya dan bersifat GR serta program-programnya disesuaikan dengan kepentingan para anggota. Koperasi ini bertujuan meningkatkan para anggota dalam hal perekonomiannya⁷⁰.

Perencanaan berdirinya koperasi ini dikarenakan Gasbiindo berpandangan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan buruh haruslah tidak semata-mata hanya bergantung nasibnya pada majikan atau perusahaan tetapi harus berusaha bekerjasama, bergotong royong berdasarkan persamaan hak dan kewajiban didalam memenuhi tuntutan kesejahteraannya. Hal ini sebagai salah satu jalan yang tepat dengan mendirikan koperasi buruh, karena salah satu dari fungsi koperasi buruh adalah sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal ini adanya kesejahteraan buruh⁷¹.

C. Gerakan Gasbiindo Pada Lapangan Politik

Kelahiran Gasbiindo adalah sebagai manifestasi dari rasa kesadaran kaum buruh Islam pada umumnya, terhadap panggilan tanah air dan bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan. Terbawa pengaruh keadaan yang menyertai awal berdirinya Gasbiindo, yakni bangsa bangsa yang

⁷⁰ Sagimun M. D, Diniet Myru, Kamara Isyah Hadiwinoto, Ambiya Hadiwinoto, (Jakarta; Balai Pustaka, 1965) 19-21

⁷¹ Ibid, 182

sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa Indonesia sendiri maupun dari ancaman bangsa asing. Gasbiindo dengan demikian dipaksa situasi untuk turut aktif menjaga stabilitas keamanannya cukup stabil maka stabilitas ekonomi akan mudah diraih.

Keikutsertaan Gasbiindo mendukung pemerintah diungkapkan pada sebuah kawat itu Gasbiindo menyatakan dirinya sebagai alat pembela Pancasila dan menjadikan dirinya sebagai alat utama melawan kelompok-kelompok yang anti Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dukungan Gasbiindo terhadap pemerintah ini disertai dengan melakukan pendekatan terhadap Soekarno secara pribadi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyampaikan doa selamat kepada Soekarno atas segala kerja yang dilakukan dalam membina bangsa dan negara dengan ideologi Pancasila yang mempunyai alat pemersatu bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur⁷².

Sikap Gasbiindo yang mendukung pemerintah juga diungkapkan dengan anggaran dasarnya bahwa Gasbiindo dalam menjalankan roda organisasi selalu berpegang pada manifes politik Republik Indonesia, seperti yang terungkap dalam bab IV pasal 4 yakni Gasbiindo dalam menjalankan daya dan upayanya serta melaksanakan perjuangannya berpedoman pada manifes politik Republik Indonesia.

⁷² Resolusi Gasbiindo dalam lapangan politik, lihat lampiran

Gasbiindo sebagai organisasi buruh yang diakui menjadi golongan fungsional turut memberikan sumbangan yang aktif dalam mensukseskan program pemerintah. Bantuan Gasbiindo ini terlihat sewaktu mendukung pengembalian Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia yang diprogramkan pemerintah dan telah dicanangkan oleh Soekarno selaku penglima besar komando tertinggi pembebasan Irian Barat, Gasbiindo dengan mengatasmamakan satu setengah juta anggota yang tergabung didalamnya mendukung sepenuhnya atas komando rakyat mendukung membebaskan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke atas kolonial Belanda, seperti yang telah diinstruksikan oleh presiden pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta⁷³.

Pengembalian wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia sudah menjadi program jangka pendek secara kabinet kerja sebagaimana yang telah diumumkan dalam tahun 1959 untuk itu Gasbiindo perlu mendukung demi suksesnya cita-cita bangsa Indonesia yakni membebaskan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke atas kolonial Belanda dan ini juga sesuai dengan hak asasi manusia⁷⁴.

Dukungan Gasbiindo untuk mensukseskan program di atas ini dibuktikan dengan mengajukan resolusi dalam sidang-sidang yang dilakukan

⁷³ Agus Sudono, 1977, 4

⁷⁴ Dukungan Gasbiindo terhadap Program Pengembalian Wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan RI, selengkapnya dilihat pada lampiran

oleh Internasional Conferderation of Face Trade Union (ICFTU), baik di tingkat Asia maupun di tingkat dunia. Sidenag ICFTU mempunyai pertimbangan bahwa dengan melalui ICFTU dapat diperjuangkan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia dalam forum yang bersifat internasional. ICFTU selain itu juga dapat digunakan sebagai forum dalam perjuangan menghancurkan imperialisme, kolonialisme maupun neokolonisme.

BAB IV

Dampak dan Hasil yang Dicapai Gasbiindo

A. Dampak Gasbiindo

Gasbiindo sebagai organisasi buruh mempunyai tujuan memperjuangkan nasib kaum buruh, serta penghidupan yang layak bagi kaum buruh yang sesuai dengan kemanusiaan dan bertujuan memperkuat front kaum buruh Islam serta bertujuan mempertahankan UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan Gasbiindo berkeinginan di samping berjuang di lapangan perburuhan juga berperan pada lapangan politik⁷⁵.

Gasbiindo yang bernafaskan ke-Islaman tetap menjunjung tinggi piagam Jakarta yang dianggap telah menjiwai UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Terutama alinea pertama yakni dasar keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya⁷⁶.

Dampak Gasbiindo pada masa demokrasi terpimpin khususnya pada masalah kenaikan upah pekerja. Pada tanggal 23 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang kenaikan upah yang

⁷⁵ Cita-cita Gasbiindo sudah ditetapkan dalam anggaran dasar pada Bab III pasal 3

⁷⁶ Gasbiindo yang menjunjung tinggi Piagam Jakarta ini diungkapkan dalam Mukadimah anggaran dasarnya

mencapai 10 % yakni dari Rp. 120,- menjadi Rp. 132,- dampak ini menjadi kesejahteraan buruh terjamin. Kerena dengan kenaikan upah buruh ini maka akan meningkatkan taraf hidup kaum buruh Indonesia pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya⁷⁷.

Gasbiindo telah berhasil mempersatukan kaum buruh Indonesia dalam satu barisan dilakukan dengan mendirikan kring-kring di tiap-tiap pusat perburuhan dan menjalin kerjasama dengan sarekat buruh yang merdeka. Hal ini dilakukan untuk memperkuat front kaum buruh Indonesia.

B. Hasil yang dicapai Gasbiindo

Gasbiindo dalam menjalankan keputusan organisasi lebih banyak mengikuti program-program pemerintah. Pada tanggal 1 Juni 1961, meresmikan rencana pembangunan nasional semesta delapan tahun. Strategi yang diusulkan adalah dengan melaksanakan rencana pembangunan itu tahap demi tahap dan daerah demi daerah. Rencana inii hendak dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tahap utama terdiri dari tiga tahap awal, dalam tahap ini Indonesia direncanakan sudah mencapai swasembada pangan, sandang, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Pada periode lima tahun berikutnya yang dianggap sebagai tahap kedua, direncanakan akan berkembang sampai ke tahap lepas landas.

⁷⁷ Merdeka, 25 Desember 1961

Gasbiindo berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya tentang masalah upah buruh di Indonesia, karena akhirnya pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang kenaikan upah para pegawai negeri dan mengajukan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk menaikkan upah buruh.

Resolusi Gasbiindo dianggap sebagai salah satu cara untuk mengajukan kepada pihak pengusaha untuk mengajukan tuntutan. Karena cara yang paling efektif bagi organisasi buruh yaitu pemogokan dilarang oleh pemerintah. Larangan ini ditandai dengan keluarnya peraturan tentang larangan pemogokan tahun 1960 dan diperbaharui tahun 1963. Larangan pemogokan ini disebabkan karena pemogokan yang dilakukan kaum buruh akan menghambat jalannya pembangunan. Adanya pemogokan pendapatan negara akan menurun bahkan bisa menggoyahkan perekonomian negara. Hal ini mempunyai dampak terhadap kaum buruh itu sendiri seperti yang pernah terjadi pada tahun 1948, yaitu pemogokan buruh yang dilakukan oleh SOBSI dengan melibatkan 500 buruh.

Dalam lembaran negara no. 77/1960, dijelaskan mengenai alasan dikeluarkannya pelarangan pemogokan, alasan itu antara lain menyebutkan :

Bahwa kepentingan kewaspadaan nasional didalam pertahanan negara, ketertiban umum, khususnya untuk mencegah gangguan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat didaerah-daerah dalam keadaan perang, masalah ini perlu diadakan peraturan-peraturan mencegah adanya pemogokan dan penetapan di perusahaan-perusahaan atau jawatan-jawatan yang vital, bahwa disamping itu perlu tetap diadakan kemungkinan untuk menyalurkan tuntutan-

tuntutan mereka yang bersangkutan dengan perusahaan, jawatan atau badan yang vital tadi⁷⁸.

Gasbiindo sebagai organisasi perburuhan tidak hanya bergerak memperjuangkan nasib kaum buruh di Indonesia, akan tetapi Gasbiindo juga berhasil pada masalah diplomatik yaitu tentang pengembalian Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam konferensi ICFTU ditingkat asia yang diselenggarakan di Manila pada tanggal 19 Oktober 1961, Gasbiindo berhasil mengajukan suatu resolusi tentang tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dalam konferensi ini Gasbiindo diwakili Wartomo Dwijoyowono.

Dalam kongres di Berlin ini Gasbiindo berhasil mengajukan suatu resolusi yang berhubungan dengan tuntutan Indonesia atas wilayah Irian Barat tersebut. Keberhasilan Gasbiindo ini ditandai dengan keluarnya solusi akibat konflik Indonesia Belanda agar keduanya mematuhi keputusan PBB, bahwa pengembalian wilayah Irian Barat harus ditentukan rakyat Irian Barat sendiri.

Keberhasilan Gasbiindo untuk memanfaatkan sidang dalam ICFTU untuk mencari dukungan luar negeri terhadap kebijakan politik Indonesia, khususnya mengenai masalah Irian Barat dijadikan sebagai motivasi oleh Gasbiindo dalam memperjuangkan kebijaksanaan politik luar negeri yang diambil oleh Indonesia di tingkat internasional khususnya dalam sidang-

⁷⁸ Lihat lembaran negara Republik Indonesia No. 77 Tahun 1960

sidang yang diselenggarakan ICFTU. Hal ini tampak pada konferensi se Asia di Okinawa Jepang pada tahun 1963. Dalam konferensi ini Malaya akan mengajukan suatu resolusi tentang dukungan pada masalah lahirnya negara baru yakni Malaysia. Resolusi dari Malaya ini berhasil digagalkan dan Gasbiindo pada waktu itu diwakili oleh Wartomo Dwijoyo⁷⁹.

Pada tanggal 5 Mei 1964 Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yang memanggil para sukarelawan untuk turut menggoyang negara boneka Malaya. Pada tanggal 16 Mei Soekarno membentuk komando siaga (Koga) yang dipimpin oleh panglima angkatan udara Omar Dani⁸⁰.

Komando Presiden tanggal 3 Mei tentang pemanggilan sukarelawan ditanggapi secara positif oleh Gasbiindo. Hal ini sudah menjadi program

Gasbiindo yang telah diputuskan pada sidang majelis nasional Gasbiindo

ke-3 keputusan itu berbunyi sebagai berikut :

Mendukung dengan sepenuhnya dan menyambut dengan gembira komando. Pemimpin besar Revolusi dalam membentuk gerakan sukarelawan sukarelawati guna memepertinggi ketahanan revolusi dan menyatakan kepada 1.500.000 anggota Gasbiindo diinstruksikan untuk menjadi anggota sukarelawan sukarelawati⁸¹.

Pada tanggal 10 Mei Gasbiindo menginstruksikan kepada segenap sarekat buruh yang bergabung didalamnya mengerahkan massanya dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Usaha ini berhasil pada tanggal

⁷⁹ Resolusi Gasbiindo dalam Kongres di Berlin, Lihat lampiran

⁸⁰ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Harapan, 1986) 76

⁸¹ Keputusan Gasbiindo masalah sukarelawan lihat, lampiran

13 Mei Ibrahim Usman sebagai ketua umum sespendo atas instruksi dari Gasbiindo mengirim kawat kepada Presiden untuk menyatakan dukungannya dan bersedia menjalankan dengan akibat-akibatnya atas komando Presiden untuk melaksanakan gerakan suka guna memperkuat ketahanan nasional⁸².

Komando Sumatera yang berpangkalan di dekat kota Medan telah diberikan wewenang formal untuk mempersiapkan diri menyerang Malaysia yang dipimpin oleh Brigadir Jendral Kemal Idris yang sejak lama sudah menentang Presiden dan tidak bersimpati pada kampanye anti Malaysia, Panglima wilayah Kalimantan dipercayakan pada Mayor jendral Maraden Pangabean dan Brigadir Jendral Ryacudu sebagai panglima Kalimantan Timur, yang akhirnya diganti oleh Brigadir Djendral Soemitro.

Munculnya para Djendral yang kurang senang dengan kebijaksanaannya yang diambil oleh Soekarno di wilayah perbatasan Malaysia seperti Soemitro, Pangabean dan Ryacudu mengakibatkan komando-komando yang diberikan membingungkan khususnya bagi sukarelawan-sukarelawan yang berada di garis depan. Dalam situasi yang demikian Gasbiindo menarik kembali sukarelawan-sukarelawan yang berada di garis depan dan yang sudah terlanjur berada di daerah musuh. Gasbiindo akhirnya dalam menghadapi suhu politik di Indonesia yang semakin panas hanya berdiam diri.

⁸² Solikhin Salam, 1964, 119

BAB V

Kesimpulan dan Penutup

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gerakan Gasbiindo dalam tahun 1961 – 1964 mencakup dua aspek yaitu dalam bidang perburuhan dan gerakan dalam bidang politik. Gerakan dalam lapangan perburuhan ditujukan untuk peningkatan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Program Gasbiindo dalam lapangan perburuhan mencakup masalah **upah buruh yang rendah, mahalnya kebutuhan barang-barang bahan pokok** di daerah-daerah tertentu yang disebabkan kurang lancarnya sirkulasi. Program Gasbiindo juga mencakup masalah kesehatan buruh yang kurang diperhatikan oleh pihak majikan, belum adanya tunjangan ganti rugi dan tunjangan yang disebabkan pemindahan tempat kerja.
3. Tuntutan Gasbiindo agar menaikkan upah buruh baik buruh yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta dan agar pemerintah memberikan tunjangan kemahalan setempat ditanggapi secara positif oleh pemerintahan. Hal ini disebabkan karena kondisi kesejahteraan para buruh sudah perlu diberikan peningkatan dan sirkulasi bahan

kebutuhan pokok tidak lancar dan membutuhkan biaya besar sehingga harganya sesampai ditangan konsumen dirasa terlalu mahal.

4. Tuntutan Gasbiindo yang lain yakni masalah tunjangan ganti rugi, tunjangan yang disebabkan perpindahan tempat kerja tidak dikabulkan oleh pemerintah. Alasan Gasbiindo meminta diberikannya tunjangan ini karena buruh yang dimutasi akan membutuhkan biaya perpindahannya dan dia perlu menyesuaikan diri baik ditempat kerjanya yang baru maupun di lingkungannya sebagai anggota masyarakat yang baru.
5. Gerakan Gasbiindo untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya juga dengan jalan mendirikan yayasan kesejahteraan dan kopreasi buruh. Yayasan dan koperasi dibentuk karena Gasbiindo mempunyai pendapat bahwa masalah kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi beban dari pihak majikan, tetapi buruh itu sendiri dan sarekat buruhnya juga berkewajiban mengusahakan peningkatan kesejahteraan itu.
6. Program yayasan kesejahteraan Gasbiindo yaitu menyangkut masalah penyediaan transportasi bagi buruh, penyediaan barak-barak untuk tempat pemondokan buruh dan pendirian dan balai-balai pengobatan sedangkan program koperasi adalah penyediaan barang-barang kebutuhan para anggota dan simpan pinjam bagi anggota. Kedua program ini hanya berhasil di kota-kota besar sedangkan di daerah program mini tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena kurang adanya kerja sama yang baik dengan pihak majikan dan pengelolaannya yang

kurang profesional dan para anggotanya kurang menyadari tentang hak dan kewajibannya.

7. Sikap politik Gasbiindo adalah anti kolonialisme dan imperialisme dan dalam menjalankan roda organisasi Manipol RI. Gerakan Gasbiindo yang anti kolonialisme dan imperialisme dibuktikan dengan mendukung sepenuhnya politik Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat dalam kekuasaan RI dan kegagalan negara boneka Malaysia yang diciptakan Inggris. Gerakan yang dilakukan Gasbiindo dalam merebut Irian Barat dan pengganyangan Malaysia dengan jalan mengirimkan sukarelawan-sukarelawannya ke medan pertempuran dan dengan diplomasi yaitu dengan memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Pertemuan seperti yang dilakukan ICFTU dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Gasbiindo untuk memperjuangkan politik Indonesia.
8. Agar program organisasi, baik dalam bidang perburuhan maupun politik dapat berjalan dengan baik. Gasbiindo harus mampu menjadi program-program yang sesuai dengan kemampuannya.

B. Penutup

Berkat rahmat Allah swt yang telah dilimpahkan pada penyusun, sehingga penulisan skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw.

yang telah merubah jaman jahiliyah yang penuh kegelapan menjadi jaman yang terang benderang yang berupa agama Islam.

Kekurangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini adalah semata-mata dari ketidakmampuan penulis, lantaran keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu diharapkan bagi para pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang positif serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Tulisan yang disusun secara ilmiah ini dengan judul "GABUNGAN SAREKAT BURUH ISLAM INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN" diharapkan bisa memberikan informasi dan keterangan kepada para pecinta ilmu pengetahuan, khususnya mahasiswa Islam. Setidaknya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Islam di masa orde baru ini.

Hanya doalah yang dapat kami panjatkan kehadiran Allah swt, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Akhirnya Wabillahittaufiq wal hidayah warridla wal inayah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : AD/ART GASBINDO
- Lampiran II : Resolusi GASBINDO Tentang Perburuhan
- Lampiran III : Resolusi GASBINDO Dalam Bidang Politik
- Lampiran IV : Keputusan sidang Majelis Nas GASBINDO
- Lampiran V : Lembaga Negara RI No : 77 & 67 Tentang Larangan Pemogokan
- Lampiran VI : Kebulatan Tekad GASBINDO
- Lampiran VII : Resolusi GASBINDO Dalam Kongres Di Berlin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fakhri & Efendi B, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan, Bandung, 1986
- Alfian, Pemikiran Dan pembaharuan Politik Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1978 ✓
- Budi Arjo, Mariam, Dasar-Dasar Ilmu politik, Gramedia, Jakarta 1982
- Boland, BJ, Pergumulan Islam Di Indonesia, Grafittipress, Jakarta, 1988
- Croch, Harold, Militer Dan Politik Di Indonesia, Pustaka sinar harapan, Jakarta 1999
- Dhakidae, Dhani, Pemilihan Umum Di Indonesia Saksi Pasang Naik Dan Surut, LP3ES, Jakarta, 1981
- Feith, Herbert & Castles lance, Pemikiran Politik Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1985
- Kulten Buwer Joost, Tata Baru Kapitalisme Dunia, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta 1993
- Karim, Rusli, M., Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Marijan, Kacung, Qua Vadis NU, Setelah Khittah 1926, Erlangga, 1963
- Ma'arif, Syafi'i, Islam Dan Politik Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1988
- Ma'arif Syafi'i, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang rencantural Dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta, 1985
- Noer, Delliari, Partai Islam Di Pentas Nasional, Grafiti, Jakarta, 1987
- Notosutarjo, H. A, Kembali Kepada Jiwa Proklamasi, Endang, Jakarta, 1964
- Qardawi, Yusuf, Pedoman ideologi Islam, Mizan, Bandung, 1986
- Soepomo, Imam, Prof, Pengantar Hukum Perburuan, Djambatan, Jakarta, 1995 ✓
- Sodono, Agus, Gerakan Buruh Di Indonesia Dan Kebijaksanaannya, Bumi Restu, Jakarta, 1977 ✓
- Soekarno , Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II, Penerbit DBR, Jakarta, 1964
- Salam solikhin, Gasbindo Soko Guru Revolusi Indonesia, PB. Gasbindo, Jakarta, 1964
- Sukarna, Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan hubungan Perburuhan Pancasila, Alumni Bandung, 1979
- Umum Ensiklopedi, Yayasan Kanisius, 1973

PENERBITAN KHUSUS

Kesejahteraan Buruh, Dinas Perburuhan Daerah TK I Jatim

Hari Ulang Tahun Partai Politik Masyumi XI, Surabaya; Pimpinan Wilayah Masyumi
Jatim, 1956

Hasil Seminar Dan Loka Karya Hubungan Perburuhan Pancasila Di Jogjakarta,

Surabaya; Dinas perburuhan propinsi daerah TK II Jatim, 1987

SURAT KABAR

Duta Masyarakat, 10 Desember 1961

Merdeka, 1961-1964

Harian Abadi, 1 Oktober 1959